

TAHUN ANGGARAN 2020

DINAS KEHUTANAN

PROVINSI JAMBI

Jl. Arif Rahman Hakim No. 10

Telanaipura Jambi

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelola keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan berbasis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel sebagai bahan pengambil kebijakan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

**KEPALA DINAS
KEHUTANAN PROVINSI JAMBI**

AKHMAD BESTARI, SH, MH
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP.197405081999031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	III
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	IV
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	5
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	8
II. NERACA	9
III. LAPORAN OPERASIONAL	10
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	11
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	12
A. PENJELASAN UMUM	12
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	24
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	27
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	34



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DINAS KEHUTANAN

Jalan Arief Rachman Hakim No. 10 Telp. (0741) 62295 , Fax. (0741) 61545

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Tahun 2020 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jambi, Januari 2021

KEPALA DINAS,

AKHMAD BESTARI, SH, MH
Pembina Utama Muda / IV. c
NIP. 19740508 199903 1 004

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2020 Unaudite Dinas Kehutanan Provinsi Jambi ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Realisasi Pendapatan Daerah pada TA 2020 adalah berupa Retribusi Taman Hutan Kenali sebesar Rp.39.124.500,-

Realisasi Belanja TA 2020 adalah sebesar Rp. 54.416.210.776,07 atau mencapai 96,64 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.56.298.966.283,34

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020. Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp.23.225.708.842,48 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.234.338.920,- ; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.22.586.569.922,48 ; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.404.800.000,-. Nilai Kewajiban berupa utang Jasa Kantor sebesar Rp.942.414,- dan jumlah Ekuitas sebesar Rp.23.224.766.428,48

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,

surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.39.124.500 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional terdiri dari beban pegawai sebesar Rp.45.806.754.293,27, beban barang dan jasa sebesar Rp.8.253.771.366,80, beban penyusutan dan amortisasi Rp.2.681.186.540,41, beban lain-lain Rp.35.346.000,- sehingga dapat defisit dari kegiatan Operasional senilai Rp.55.799.716.660,48.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp.25.210.585.634,32. dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.55.799.716.660,48, koreksi ekuitas penyesuaian aset tetap Rp. 14.150.000,-, koreksi ekuitas akumulasi penyusutan Rp. 82.938.821,43, koreksi penyesuaian aset lainnya Rp. 468.700.000,- ditambah dengan koreksi ekuitas perhitungan mutasi masuk dan keluar aset tetap senilai Rp.2.600.000,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp.23.224.766.428,48

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan berbasis akrual.

I.LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2020		% thd Angg	TA 2019
	ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	30.000.000	39.124.500		
Penerimaan Retribusi Daerah	30.000.000	39.074.500	130.25	100.287.000
JUMLAH PENDAPATAN	30.000.000	39.074.500	130.25	100.287.000
				0,00
BELANJA	56.298.966.283	54.416.210.776	96.66	72.033.454.546
Belanja Operasi	55.937.116.283	54.055.510.576	96.64	67.091.398.068
Belanja Pegawai	47.566.913.486	45.806.754.293	96.30	50.707.067.450
Belanja Barang dan Jasa	8.370.202.797	8.248.756.283	98.55	14.987.801.618
Belanja Hibah	-	-	0.00	
Belanja Modal	361.850.000	360.700.200	99.68	4.942.056.478
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	163.000.000	162.250.200	99.54	1.754.178.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.850.000	198.450.000	99.80	3.187.878.478
SURPLUS / (DEFISIT)	56.268.966.283	54.526.714.467	96.90	0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	56.268.966.283	54.526.714.467	96.90	75.578.982.023

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI NERACA

PER 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019 *(Dalam Rupiah)*

URAIAN	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas lainnya dan setara Kas	-	-
Piutang Bukan Pajak	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
Penyisihan Utang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	-	-
Beban Dibayar Dimuka	-	-
Pendapatan yang Masih Harus di Terima	-	-
Persediaan	234.338.920	251.672.000
JUMLAH ASET LANCAR	234.338.920	251.672.000
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen	-	-
Investasi Permanen	-	-
Penyisihan Piutang dana bergulir dari investasi non permanen	-	-
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	-	-
ASET TETAP		
Tanah	1.022.663.192	1.022.663.192
Peralatan dan Mesin	27.077.033.555	26.138.362.315
Gedung dan Bangunan	14.128.171.416	13.963.171.416
Jalan, Jaringan dan Instalasi	6.979.329.270	6.979.329.270
Aset Tetap Lainnya	222.142.963	222.142.963
Konstruksi dalam pengerjaan	148.350.000	-
Akumulasi Penyusutan	(26.991.120.473)	(24.226.995.111)
Jumlah Aset Tetap	22.586.569.922	24.098.674.044
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	-	35.500.000
Aset Tidak Berwujud	-	-
Aset Lain-Lain	404.800.000	838.000.000
Jumlah Aset Lainnya	404.800.000	873.500.000
JUMLAH ASET	23.225.708.842	25.223.846.044
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
Utang Bunga	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	-	-
Utang Belanja	942.414	13.260.410
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	942.414	13.260.410
JUMLAH KEWAJIBAN	942.414	13.260.410
EKUITAS		
Ekuitas	23.224.766.428	25.210.585.634
JUMLAH EKUITAS	23.224.766.428	25.210.585.634
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	23.225.708.842	25.223.846.044

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III.LAPORAN OPERASIONAL
DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 dan
31 DESEMBER 2019*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	2020	2019
KEGIATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO		
Pendapatan Retribusi Daerah	39.124.500	100.287.000
Pendapatan Hibah-LO	938.217.040	626.560.900
JUMLAH PENDAPATAN	977.341.540	726.847.900
BEBAN		
Beban Pegawai	45.806.754.293	50.707.067.450
Beban Persediaan	-	-
Beban Barang dan Jasa	8.253.771.367	15.340.289.397
Beban Bunga	-	-
Beban Subsidi	-	-
Beban Hibah	-	1.396.529.000
Beban Bantuan Sosial	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.681.186.540	2.676.279.296
Beban Lain-lain	35.346.000	31.595.200
JUMLAH BEBAN	56.777.058.200	70.151.760.343
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(55.799.716.660)	(69.424.912.443)
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	-	-
Defisit Selisih Kurs	-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(55.799.716.660)	(69.424.912.443)
POS LUAR BIASA		
Pendapatan PNB	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-
Beban Persediaan	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	(55.799.716.660)	(69.424.912.443)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV.LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	25.210.585.634	-
SURPLUS/DEFISIT LO	(55.799.716.660)	(69.424.912.443)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Koreksi Ekuitas Lainnya	-	-
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap	14.150.000	-
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	82.938.821	-
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lainnya	468.700.000	-
Koreksi Ekuitas Akumulasi Amortisasi Aset	-	-
Koreksi Ekuitas Perhitungan Mutasi Masuk dan	-	-
Keluara aset Tetap	2.600.000	-
Koreksi Ekuitas Nilai Investasi Permanen	-	-
Koreksi Ekuitas Lain-Lain	-	-
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	54.377.086.276	-
EKUITAS AKHIR	23.224.766.428	(69.424.912.443)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V.CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

Tugas Pokok Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 termasuk dalam misi 1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik melalui Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur. Misi 2. Menjaga situasi daerah yang Kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat melalui Program Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Misi. 3 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan yang tercantum dalam Misi Provinsi Jambi yakni menuju Jambi TUNTAS 2021 melalui Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Entitas berkedudukan di Jalan Arif Rahman Hakim No.10 Telanai Pura Jambi.

Implentasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, dengan ditariknya kewenangan kehutanan dari kabupaten/kota sehingga dalam menjalankan amanah dalam pengelolaan hutan ditingkat tapak Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dibantu dengan 12 UPTD yang terdiri dari 11 UPTD KPHP dan 1 UPTD Tahura.

Dalam pengelolaan anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tidak terlepas dari Neraca Pembangunan Provinsi

Jambi, dimana Kepala Dinas sesuai dengan Tupoksinya bertindak sebagai Penggunaan Anggaran.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.

SIMDA dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

A.3. Basis Akuntansi

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi

yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu

entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah.
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasikan , yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan

pendapatan-LO pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi adalah Pendapatan Retribusi Daerah;

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUD.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BAKEUDA Provinsi Jambi.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

- **Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau kurang dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau kurang dari Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas,

diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset

Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

(TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia	10

Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka

Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.39.124.500 atau mencapai 130,42 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000. Pendapatan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi berasal dari Retribusi Taman Hutan Kenali Pal XI. Menurunnya target penerimaan Daerah dari Retribusi Taman Hutan Kenali Pal XI karena difokuskan pengaruh pandemi covid-19.

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2020 adalah sebesar Rp.54.416.210.776,07 atau 96,66 persen dari anggaran

belanja sebesar Rp.56.298.966.283,34 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	47.566.913.486	45.806.754.293	96.30
Belanja Barang dan jasa	8.370.202.797	8.248.756.283	98.55
Belanja Modal peralatan dan Mesin	163.000.000	162.250.200	99.54
Belanja Modal Gedung dan Ba	198.850.000	198.450.000	99.80
Total Belanja Kotor	56.298.966.283	54.416.210.776	96.66
Pengembalian			-
Jumlah	56.298.966.283	54.416.210.776	96.66

B.3 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2020 adalah sebesar Rp.8.248.756.283 atau 98,55 % dari anggaran sebesar Rp. 8.370.202.797 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2020

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Alat Tulis Kantor	265.834.774	261.656.912	98.43
Belanja Alat Listrik dan Elektronik	21.285.340	21.267.895	99.92
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lain	27.403.900	26.908.200	98.19
Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pemeliharaan	17.712.693	17.658.096	99.69
Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	20.000.000	20.000.000	100.00
Biaya Dokumentasi	8.053.300	7.851.300	97.49
Biaya Dekorasi	40.169.290	39.919.290	99.38
Biaya Publikasi	17.885.255	12.150.000	67.93
Belanja Bahan Baku Bangunan	55.773.424	54.052.500	96.91
Belanja Bahan/bibit Tanaman	277.436.000	275.522.150	99.31
Belanja Bahan Obat-obatan	21.350.000	21.040.000	98.55
Belanja Bahan kimia dan pupuk	65.955.000	65.823.750	99.80
Belanja Peralatan Pameran/Stand	10.650.000	10.650.000	100.00
Belanja Bahan praktek dan percontohan	79.957.000	78.340.868	97.98
Belanja Pengadaan Pembelian Bahan	14.470.000	13.570.000	93.78
Belanja Telepon	5.000.000	3.564.808	71.30
Belanja Air	13.000.000	12.978.125	99.83
Belanja Listrik	291.000.000	277.461.575	95.35
Belanja Surat Kabar/Majalah	13.212.340	11.495.100	87.00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet	100.000.000	88.910.243	88.91
Belanja Paket Pengiriman	6.743.080	6.545.960	97.08
Belanja Jasa Pembuatan Display	190.000.000	189.824.200	99.91
Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/narasumber	77.350.000	77.350.000	100.00
Belanja Jasa Upah/Ongkos tenaga kerja bulanan	2.000.000	2.000.000	100.00
Belanja Jasa Upah/Ongkos tenaga Kerja Harian	255.390.000	253.566.800	99.29
Belanja Jasa Transper Liputan	125.000.000	124.526.000	99.62
Belanja Transportasi	105.450.150	105.450.000	100.00
Belanja Akomodasi dan Konsumsi	23.750.000	21.000.000	88.42
Belanja Jasa Service	76.001.160	75.981.980	99.97
Belanja Penggantian Suku Cadang	177.999.924	177.999.455	100.00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumasan	400.000.000	399.992.100	100.00
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	35.000.076	29.856.600	85.30
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.000.000	6.894.000	98.49
Belanja Cetak	115.091.478	107.015.968	92.98
Belanja Penggandaan	75.896.400	75.319.250	99.24
Belanja sewa Gedung/Kantor/Tempat	27.000.000	27.000.000	100.00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.300.000	3.300.000	100.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas darat	27.500.000	27.500.000	100.00
Belanja makan dan minum Harian Pegawai	2.000.000	1.980.000	99.00
Belanja Makan dan Minum Rapat	147.496.900	138.460.250	93.87
Belanja Makan dan Minum Tamu	4.000.000	1.350.000	33.75
Belanja makan dan Minum Pelatihan	8.000.000	8.000.000	100.00
Belanja makan dan minum Sosialisasi	17.216.700	14.900.000	86.54
Belanja makan dan minum Pelaksana Kegiatan	40.925.000	40.925.000	100.00
Belanja Pakaian Dinas harian (PDH)	286.650.000	286.209.000	99.85
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.698.365.449	2.691.862.569	99.76
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	554.210.967	528.913.505	95.44
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	55.000.000	54.796.000	99.63
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	227.087.997	224.474.634	98.85
Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	10.000.000	7.600.000	76.00
Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	273.324.000	272.816.000	99.81
Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	11.232.000	11.232.000	100.00
Belanja Honorarium PNS lainnya	2.850.000	2.850.000	100.00
Honorarium Operator LPPK dan TEPRA	12.000.000	12.000.000	100.00
Honorarium Penatausahaan Keuangan	333.523.200	328.744.200	98.57
Belanja Honorarium Pegawai Honororer/Tidak tetap	583.200.000	583.200.000	100.00
Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor	6.500.000	6.500.000	-
Total Belanja Kotor	8.370.202.797	8.248.756.283	98.55
Pengembalian			-
Jumlah	8.370.202.797	8.248.756.283	98.55

B.4 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2020 adalah sebesar Rp.361.850.000 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan mesin TA 2020 adalah Rp.163.000.000

B.4.2 Belanja Modal Bangunan dan Gedung

Realisasi Belanja Modal Gedung dan bangunan TA 2020 adalah Rp.198.850.000

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2020 dan 2019

Keterangan	TH 2020	TH 2019
Uang Tunai	-	-
Bank Tabungan Negara Jambi No.rek.101001806	-	-
kwitansi UP yang belum di SP2D kan	-	-
Jumlah	-	-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.0 Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya Pendapatan Retribusi Daerah terdapat Anggaran estimasi penerimaan sebesar Rp.30.000.000, yang terealisasi sebesar Rp.39.124.500

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2020 dan 2019

Keterangan	TH 2020	TH 2019
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNB TA 2020 dan 2019

Uraian	TH 2020	TH 2019
Piutang PNB	-	-
Piutang Lainnya	-	-

5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh

namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.234.338.920 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2020 dan 2019

Jenis	TH 2020	
Alat Tulis Kantor	162.482.170	
Bahan Kebersihan	1.040.000	
Bahan Kimia	-	
Pupuk	-	
Alat Listrik	15.966.750	
Aset yang akan diserahkan pada pihak ketiga	54.850.000	
Jumlah	234.338.920	

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang terdiri dari :

1. Alat Tulis kantor Rp 162.482.170 (rincian terlampir)
2. Bahan Kebersihan Rp. 1.040.000 (rincian terlampir)
3. Alat Listrik Rp. 15.966.750
4. Aset yang akan diserahkan ke pihak ketiga berupa bibit yang diserahkan kemasyarakat Rp.54.850.000

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan

Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.1.022.663.192.

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 adalah Rp.27.077.033.554,87 peralatan dan mesin dicatat pada buku Inventaris Barang tersendiri.

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai aset tetap berupa gedung dan bangunan yang dimiliki Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.14.128.171.415,65 Gedung dan Bangunan dicatat pada buku Inventaris Barang Tersendiri.

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Nilai aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.6.979.329.270 Jalan, Irigasi dan Jaringan dicatat pada Buku Inventaris Barang tersendiri.

C.18 Aset Tetap Lainnya

Nilai aset tetap berupa Aset tetap lainnya yang dimiliki Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.222.142.963 aset tetap lainnya dicatat pada Buku Investaris Barang tersendiri.

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Nilai kontruksi dalam pengerjaan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Rp.148.350.000.

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Pada Dinas Kehutanan terdapat Saldo Akumulasi. Penyusutan aset tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp.26.991.120.473,04.

C.21 Aset Tak Berwujud

Pada Dinas Kehutanan tidak mempunyai aset tak terwujud sehingga tidak terdapat Saldo Aset tak terwujud per 31 Desember 2020.

C.22 Aset Lain-Lain

Nilai Aset lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp.404.800.000.

C.24 Hutang Kepada Pihak Ketiga

Nilai utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0. utang kepada pihak ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) sejak tanggal pelaporan.

C.25 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020 Rp.0 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.0 Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima

pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2020 sebesar Rp.942.414 merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang dananya tidak mencukupi pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.25.932.058.570 dan Rp.18.803.703.261 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 39.124.500.

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2020 sebesar Rp.45.806.754.293,27 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

D.3 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa tahun 2020 adalah sebesar Rp.8.253.771.366,80

D.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp.2.681.186.540,41

D.4 Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp.35.346.000

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.25.210.585.634,32

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. (55.799.716.660,48). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap

Nilai koreksi ekuitas penyesuaian aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.14.150.000.

E.4 Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai koreksi ekuitas penyusutan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.82.938.821,43

E.5 Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lainnya

Nilai koreksi ekuitas penyesuaian aset lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.468.700.000

E.6 Koreksi Ekuitas Perhitungan Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap

Nilai koreksi ekuitas perhitungan mutasi masuk dan keluar aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.2.600.000 koreksi ekuitas perhitungan mutasi masuk dan keluar aset tetap merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

PENGGUNA ANGGARAN

AKHMAD BESTARI.SH.MH
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP.197405081999031004

